

Mampukah Indonesia Lolos dari Potensi Krisis Ekonomi?

Strategi Realistis Menghadapi Tekanan Fiskal dan Moneter

Perspektif Fiskal: Kredibilitas • Belanja Berkualitas • Policy Mix

Bambang Juanda
Departemen Ilmu Ekonomi IPB

Ruang Rapat Fraksi PAN DPR RI
Kamis, 9 Juli 2026

Agenda Paparan 20 Menit

1. Diagnosa risiko

Apakah Indonesia berpotensi krisis? Indikator mana yang harus dipantau?

2. Kondisi fiskal

Ruang fiskal, belanja besar, tax ratio, utang dan dana idle.

3. Koreksi kebijakan

MBG, Koperasi Merah Putih, hilirisasi, infrastruktur, dan re-sentralisasi.

4. Strategi realistis

Credibility before stimulus, reformasi belanja, tax base, desentralisasi, policy mix.

Executive Message

Indonesia belum berada dalam krisis, tetapi sedang memasuki fase rawan tekanan.

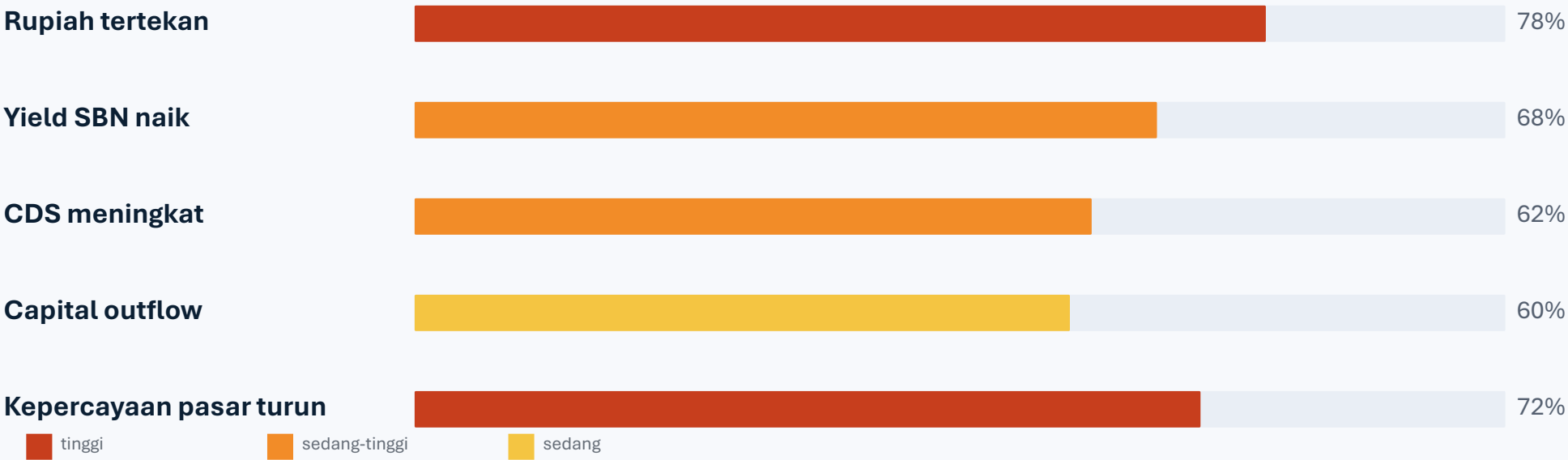
Tekanan utama bukan hanya defisit APBN, tetapi gabungan: rupiah, biaya utang, belanja besar, tax ratio rendah, dana idle, dan kredibilitas kebijakan. Krisis fiskal muncul saat pasar mulai meragukan kemampuan dan kemauan pemerintah menjaga disiplin fiskal.

Strategi kunci: *credibility before stimulus.*

Stimulus fiskal hanya efektif jika APBN dipercaya dan belanjanya produktif.

Apakah Indonesia Berpotensi Mengalami Krisis?

Krisis modern jarang datang dari satu indikator; ia muncul dari akumulasi tekanan yang saling memperkuat.



Pertanyaan kunci

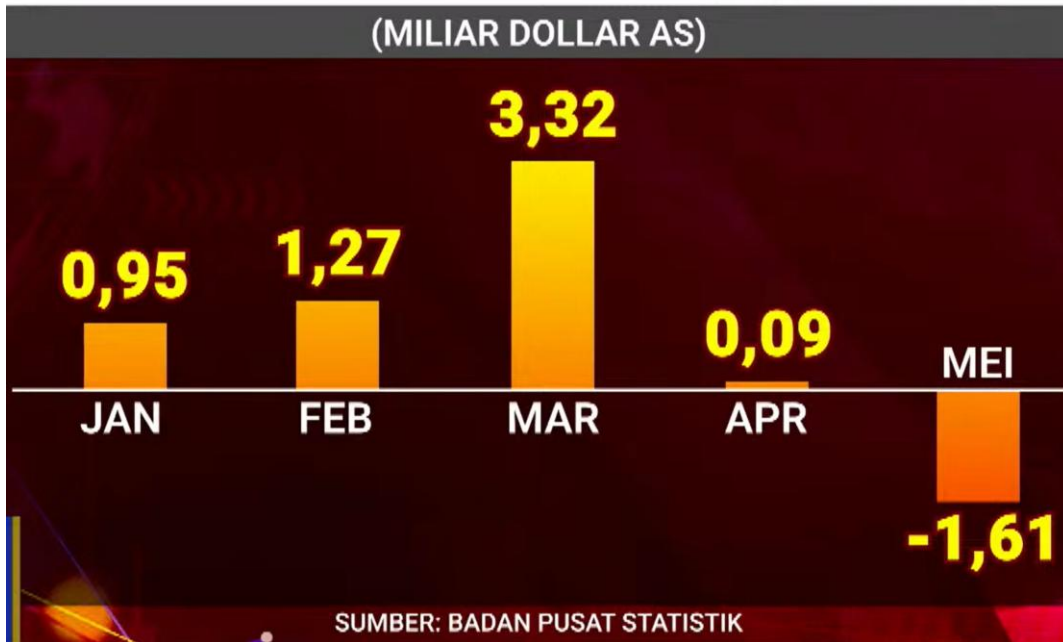
Bukan hanya:
“Defisit berapa?”

Tetapi:
“Apakah APBN masih
dipercaya pasar?”

Catatan visual: angka 78%, 68%, dst. adalah skor indikatif risiko (0–100) untuk memudahkan diskusi—bukan data statistik resmi. Warna menunjukkan tingkat tekanan: merah = tinggi; oranye = sedang-tinggi; kuning = sedang.

NERACA PERDAGANGAN RI 2026

(MILIAR DOLLAR AS)

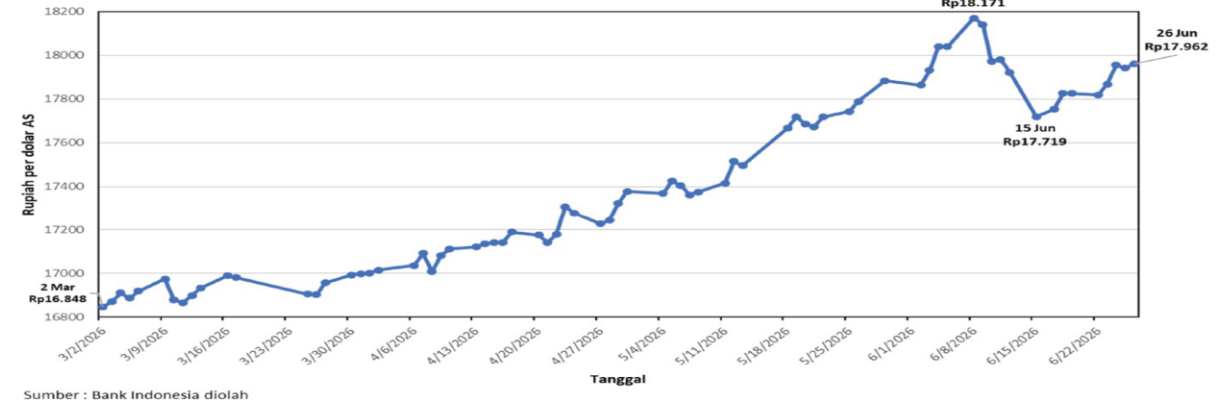


CADANGAN DEVISA RI 2026

(DALAM DOLLAR AS)



Perkembangan KURS JISDOR Rupiah per USD 2 Maret - 26 Juni 2026



Gambar 15.1 Perkembangan Kurs JISDOR Rupiah terhadap Dolar AS, 2 Maret –26 Juni 2026



Kondisi Fiskal: Formal Terkendali, Tekanan Meningkat

Belanja negara tetap besar untuk menopang pertumbuhan dan perlindungan sosial. Namun banyak pos belanja sudah terkunci: pegawai, bunga utang, subsidi, bansos, TKD, dan program prioritas politik. Ruang diskresi fiskal mengecil justru saat tuntutan stimulus dan pembangunan meningkat. Tekanan fiskal perlu dibaca bersama tekanan moneter: rupiah, inflasi, suku bunga, dan arus modal.

Belanja wajib



Subsidi & bansos



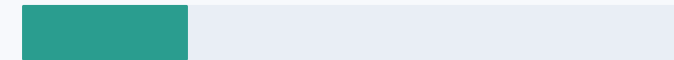
Bunga utang



Program prioritas



Ruang fiskal diskresi



Catatan visual: panjang bar menggambarkan rigiditas/tekanan pos anggaran secara ilustratif. Merah–oranye–kuning–biru = pos belanja yang mengunci APBN; hijau = ruang fiskal diskresi yang tersisa.

Tekanan Fiskal 2026–2027

Belanja besar belum tentu produktif

MBG, Koperasi Merah Putih, hilirisasi, infrastruktur harus diuji multiplier, targeting, tata kelola, dan fiscal risk.

Beban bunga & rollover risk

Risiko utama bukan hanya utang/PDB, tetapi pembiayaan ulang utang jatuh tempo dengan biaya yang wajar.

Tax ratio rendah

Agenda belanja besar tidak sejalan dengan basis pajak yang masih sempit dan sektor informal yang besar.

Dana idle pemerintah

Kas pusat dan daerah mengendap menunjukkan problem cash management, bukan semata problem likuiditas.

Credibility Before Stimulus



Stimulus tanpa kredibilitas dapat berubah menjadi sumber instabilitas.

Efektivitas Belanja: Tiga Tes Wajib



**Tepat
sasaran**

Targeting penerima dan
wilayah prioritas



**Multiplier
besar**

Mendorong output,
pekerjaan, dan permintaan
lokal



**Produktivitas
jangka
panjang**

Meningkatkan kapasitas
ekonomi dan penerimaan
masa depan

Program yang tidak lolos tiga tes ini perlu diseleksi ulang, ditargetkan ulang, atau ditunda.

MBG: Tujuan Baik, Desain Fiskal Perlu Dikoreksi

Tujuan positif: gizi, kualitas SDM, produktivitas masa depan.

Risiko fiskal: universal terlalu cepat, biaya administrasi besar, dan pelaksanaan sentralistik.

Risiko kelembagaan: membangun struktur vertikal baru di daerah dan mengabaikan lembaga lokal yang sudah ada.

Arah koreksi: targeted nutrition program berbasis sekolah, puskesmas, pesantren, Pemda, dan dashboard outcome.

Outcome yang perlu diukur

Status gizi

Kehadiran sekolah

Capaian belajar

Insiden pangan

Belanja lokal

https://bambangjuanda.com/wp-content/uploads/2026/05/Tata-Kelola-MBG-agar-Kebijakan-Fiskal-Optimal_BJ.pdf

Wacana PBJT utk mengakomodasi TKD yg turun https://bambangjuanda.com/wp-content/uploads/2026/06/Paparan_Bappenas_MBG_PBJT_BJ.pdf

Koperasi Merah Putih: Jangan Menjadi Re-sentralisasi Baru

Koperasi akan produktif jika lahir dari kebutuhan ekonomi lokal — bukan hanya instruksi administratif.

Risiko Dana Desa/TKD makin terkunci untuk program pusat.

Kebutuhan desa yang berbeda-beda terabaikan oleh desain seragam.

Potensi moral hazard dan kredit macet meningkat jika pembiayaan dipaksakan.

Koperasi perlu berbasis komoditas, jaringan pasar, dan kapasitas manajemen lokal.

Prinsip: pusat memberi standar & insentif; daerah menyesuaikan model dengan basis ekonomi lokal.

<https://www.republika.id/posts/59835/ovop-dan-koperasi-merah-putih-jalan-desa-naik-kelas-di-rantai-nilai-global>

Hilirisasi & Infrastruktur: Uji Produktivitas Fiskal

Hilirisasi

Harus menaikkan nilai tambah domestik, pajak, serapan tenaga kerja, transfer teknologi, dan ekspor bernilai tambah.

Risiko

Insentif terlalu besar dapat menjadi subsidi terselubung kepada korporasi bila penerimaan negara kecil.

Infrastruktur

Prioritas pada konektivitas logistik, pangan, air, transportasi publik, dan proyek dengan ERR tinggi.

Koreksi

Seleksi ulang proyek berdampak rendah, pembatasan proyek mercusuar, dan spending review berkala.

Beban Utang: Risiko Tidak Cukup Dilihat dari Utang/PDB

Rasio utang/PDB dapat terlihat aman, tetapi risiko meningkat jika bunga naik, rupiah melemah, dan penerimaan stagnan.

Rollover risk: kemampuan membiayai kembali utang jatuh tempo dengan biaya yang tetap wajar.

Ukuran penting: bunga utang/penerimaan, defisit primer, jatuh tempo/pembiayaan, porsi valas, kepemilikan asing, yield SBN, CDS.

Bunga/Penerimaan

Defisit primer

Jatuh tempo

Utang valas

Yield SBN

CDS (Credit Default Swap)

CDS = Credit Default Swap: premi/asuransi risiko gagal bayar utang. CDS naik → persepsi risiko naik → yield SBN cenderung naik.

Tax Ratio: Perluasan Basis, Bukan Sekadar Kenaikan Tarif

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | Basis pajak digital | NIK-NPWP, QRIS, e-commerce, data rekening |
| 2 | Ekonomi ilegal | Rokok ilegal, impor ilegal, tambang ilegal, undervaluation |
| 3 | CRM berbasis data | Pemeriksaan pajak berbasis risiko, bukan target semata |
| 4 | Cukai berdampak negatif | Minuman berpemanis, vape, plastik, produk berisiko kesehatan |
| 5 | PNBP SDA | Royalti adaptif terhadap harga komoditas |

Reformasi Belanja Berkualitas

Tepat sasaran

Target penerima, wilayah, dan sektor sesuai kebutuhan dan kerentanan.

Tepat waktu

Front-loading belanja produktif sejak triwulan I–II, bukan menumpuk akhir tahun.

Outcome-based

Evaluasi berbasis hasil: gizi, pekerjaan, produktivitas, PAD, dan layanan publik.

Multiplier tinggi

Prioritaskan belanja yang menggerakkan UMKM, pangan, logistik, dan padat karya.

Desentralisasi Fiskal sebagai Solusi

Pusat menetapkan standar, data, dan monitoring; daerah menjalankan inovasi dengan akuntabilitas.

Re-sentralisasi menambah biaya birokrasi, memperlemah inovasi daerah, dan mengaburkan akuntabilitas.

APBD langsung menyentuh jalan lokal, **sekolah**, puskesmas, pasar, UMKM, transportasi, dan **layanan dasar**.

Dana idle daerah perlu dibedakan: dana siaga vs uang tidur.

Solusi: DIF berbasis outcome, DAK lebih sederhana, Local Treasury Single Account, belanja daerah berkualitas.

<https://www.republika.id/posts/60117/sekolah-rakyat-dan-tantangan-desentralisasi-pendidikan>

Policy Mix Fiskal–Moneter

BI

Menjaga stabilitas rupiah, inflasi, dan sistem keuangan.

Pemerintah

Menjaga kredibilitas APBN dan memastikan belanja produktif.

Supply-driven

Likuiditas ke Himbara dapat menurunkan cost of fund, tetapi tidak otomatis menjadi kredit produktif.

Demand-driven

Belanja berkualitas, penjaminan, pendampingan UMKM, dan kepastian regulasi menciptakan permintaan kredit riil.

Strategi Realistis Menghindari Krisis: 12–24 Bulan

0–6 bulan

Stabilisasi kredibilitas

Spending review, prioritas belanja berdampak tinggi, tahan proyek rendah, komunikasi fiskal, dashboard dana idle

6–12 bulan

Perbaikan eksekusi fiskal

Front-loading belanja modal, percepat pengadaan, TKD berbasis kinerja, perlindungan sosial tepat sasaran

12–24 bulan

Reformasi struktural

Tax ratio, desentralisasi berbasis outcome, hilirisasi yang menghasilkan penerimaan, cash management nasional

10 Rekomendasi Kebijakan

1. Credibility before stimulus

2. Spending review program besar

3. MBG targeted & berbasis daerah

4. Koreksi re-sentralisasi

5. Perluas tax base

6. Cash management pusat–daerah

7. Belanja daerah berkualitas

8. Jaga independensi BI

9. Utang untuk produktivitas

10. Early warning system krisis

Penutup

Jaga kredibilitas APBN, perbaiki kualitas belanja, perluas basis penerimaan, koreksi re-sentralisasi, dan bangun policy mix fiskal-moneter yang sehat.

Indonesia tidak membutuhkan stimulus yang sekadar besar.
Indonesia membutuhkan stimulus yang dipercaya, tepat sasaran, produktif,
dan menggerakkan sektor riil.

Terima kasih

Kredibilitas Sebelum Stimulus

Fitch • Rupiah • Cadangan Devisa • CDS • Demand-driven Policy

Pesan utama: Fitch perlu dibaca sebagai early warning—bukan vonis krisis. Respons paling kredibel adalah memperkuat disiplin fiskal, kualitas belanja, dan policy mix yang sehat.

Fitch: Sinyal Kredibilitas dan Kepercayaan Pasar

Laporan Fitch memperkuat pesan bahwa risiko utama saat ini bukan hanya angka defisit, melainkan persepsi pasar terhadap konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, dan bantalan eksternal.

Outlook negatif

Sinyal bahwa pasar menilai ketidakpastian kebijakan dan kredibilitas policy mix perlu diperbaiki.

Cadangan devisa

Bantalan eksternal masih memadai, tetapi penurunan yang persisten dapat mengurangi amunisi stabilisasi rupiah.

Rupiah & psikologi pasar

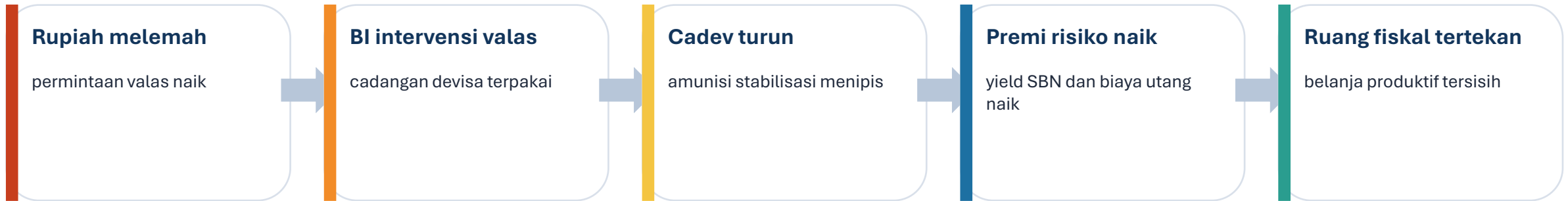
Level psikologis rupiah membuat pasar lebih sensitif terhadap berita negatif dan inkonsistensi kebijakan.

Respons

Perkuat kredibilitas fiskal: spending review, transparansi, dan komunikasi kebijakan yang teknokratis.

Kalimat kunci untuk disampaikan: “Fitch tidak mengatakan Indonesia pasti krisis; Fitch mengingatkan bahwa kredibilitas kebijakan menjadi bantalan paling penting ketika rupiah dan cadangan devisa tertekan.”

Bantalan Eksternal Mulai Diuji



Neraca perdagangan sebagai alarm tambahan

Defisit perdagangan setelah periode surplus panjang menunjukkan bantalan eksternal tidak bisa lagi dianggap otomatis kuat.

Implikasi fiskal

Jika rupiah melemah dan yield naik, pembayaran bunga serta kebutuhan pembiayaan menjadi lebih mahal.

Makna kebijakan: pertahanan rupiah tidak cukup melalui intervensi valas. Akar kepercayaan pasar harus dijawab melalui disiplin fiskal, kepastian regulasi, dan belanja produktif.

1998 vs 2026: Berbeda, tetapi Tetap Rawan

1998

- Rezim kurs lebih kaku
- Perbankan rapuh
- Cadangan devisa terbatas
- Krisis kepercayaan cepat menjadi krisis sistemik

2026

- Kurs lebih fleksibel
- Perbankan relatif lebih kuat
- Kerangka moneter lebih modern
- Tetapi rupiah menjadi kanal cepat persepsi pasar

Kesimpulan: Indonesia tidak sama dengan 1998, tetapi fleksibilitas kurs bukan berarti bebas risiko. Jika kredibilitas kebijakan turun, rupiah dapat melemah lebih dalam meskipun BI melakukan intervensi.

CDS: “Termometer” Kepercayaan Pasar

CDS = Credit Default Swap

Kontrak/premi asuransi untuk melindungi investor dari risiko gagal bayar surat utang.

Jika CDS naik

Pasar menilai risiko meningkat; investor meminta kompensasi imbal hasil lebih tinggi.

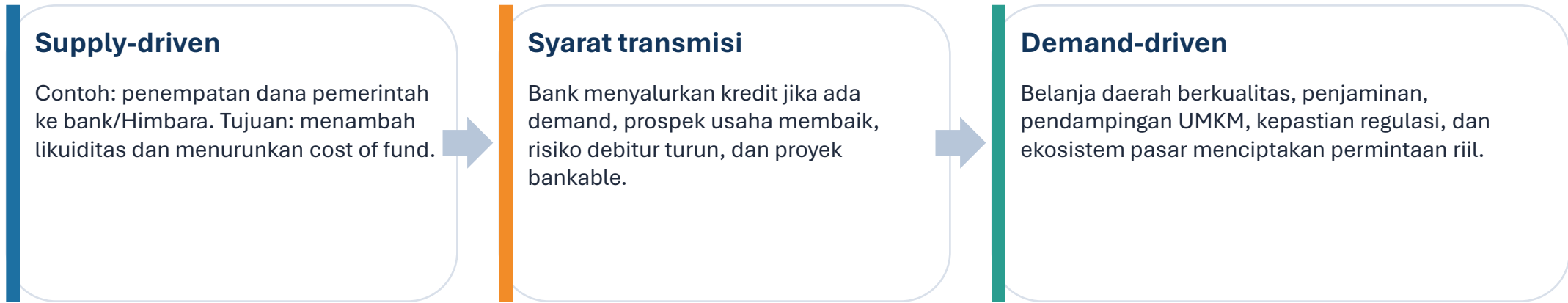
Dampak ke APBN

Yield SBN naik, biaya utang meningkat, ruang fiskal untuk belanja produktif menyempit.



Gunakan CDS bersama indikator lain: rupiah, yield SBN, cadangan devisa, capital outflow, defisit primer, dan rasio bunga utang terhadap penerimaan.

Supply-driven Harus Bertemu Demand-driven



Risiko yang perlu dicegah: dana murah hanya mengendap, masuk instrumen aman, atau dipakai untuk rollover kredit lama. Karena itu, stimulus harus dikaitkan dengan output sektor riil.

Kalimat kunci: “Likuiditas adalah syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup untuk pertumbuhan.”

Kredibilitas Adalah Kebijakan Itu Sendiri

“Indonesia tidak membutuhkan stimulus yang sekadar besar. Indonesia membutuhkan stimulus yang dipercaya, tepat sasaran, produktif, dan mampu menggerakkan sektor riil.”

Pasar tidak menunggu pidato

Pasar menunggu bukti kebijakan fiskal yang hati-hati, transparan, teknokratis, dan produktif.

APBN harus dipercaya

Defisit, pembiayaan, dan kualitas belanja harus konsisten dengan stabilitas makro.

Stimulus harus produktif

Setiap rupiah APBN/APBD harus bekerja lebih keras untuk output, pekerjaan, dan tax base.

Jalan realistis: jaga kredibilitas APBN, perbaiki kualitas belanja, perluas basis pajak, koreksi re-sentralisasi, dan bangun policy mix yang sehat.